Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ala Rowanda*, Baiq Ismiwati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, 83125, Indonesia
Email: [1,*]alarowanda60@gmail.com , [2]ismiwati2010@unram.ac.id
Email Penulis Korespondensi : alarowanda60@gmail.com
Submitted: **08/05/2026**; Accepted: **02/06/2026**; Published: **02/06/2026**

Abstrak−Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai indikator kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah serta data yang diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang diolah menggunakan metode regresi data panel untuk menganalisis hubungan antarvariabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan koefisien sebesar 0,703146, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar 0,70%. Sebaliknya, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -0,246675, di mana setiap peningkatan Dana Perimbangan sebesar 1% akan menurunkan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar 0,24%. Demikian pula, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -0,135521, di mana setiap peningkatan Belanja Modal sebesar 1% akan menurunkan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar 0,13%. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 97,99%, sedangkan sisanya 2,01% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; Belanja Modal; Kinerja Keuangan Daerah

Abstract−The urgency of this research lies in the importance of local government financial performance as an indicator of the region's ability to manage financial resources effectively and efficiently. This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD), balancing funds, and capital expenditure on the financial performance of local governments in regencies/cities in West Nusa Tenggara Province. Data collection methods were carried out through documentation and literature review sourced from local government financial reports as well as data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) website. The type of data in this study is quantitative data, which is processed using the panel data regression method to analyze the relationships between the variables studied. The research results indicate that partially, Local Own-Source Revenue has a positive and significant effect on the financial performance of local governments with a coefficient of 0.703146, which indicates that every 1% increase in PAD will increase the Fiscal Independence Ratio by 0.70%. Conversely, Balancing Funds have a negative and significant effect with a coefficient of -0.246675, where every 1% increase in Balancing Funds will decrease the Fiscal Independence Ratio by 0.24%. Similarly, Capital Expenditure has a negative and significant effect with a coefficient of -0.135521, where every 1% increase in Capital Expenditure will decrease the Fiscal Independence Ratio by 0.13%. Simultaneously, Local Own-Source Revenue, Balancing Funds, and Capital Expenditure together have a significant effect on the financial performance of regional governments in regencies/cities in West Nusa Tenggara Province with an Adjusted R-squared value of 97.99%, while the remaining 2.01% is influenced by variables outside the research model.

Keywords: Regional Original Revenue (PAD); Balancing Funds; Capital Expenditure; Regional Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan paradigma fundamental dalam transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1999 melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lewis, 2023). Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat lokal melalui transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Alonso & Andrews, 2019). Pengaturan mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan hak daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri, serta diperkuat oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memperbarui skema hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lewis, 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting yang mencerminkan kapasitas dan efektivitas daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan (Badrudin & Siregar, 2019). Hubungan antara PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan melalui teori fiscal federalism yang menekankan pembagian tanggung jawab fiskal dan efisiensi alokasi antar tingkat pemerintahan (Oates, 2005). Teori ini berpandangan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien apabila dikelola pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Teori keagenan (agency theory) memberikan landasan konseptual dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan publik, dimana masyarakat sebagai principal

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

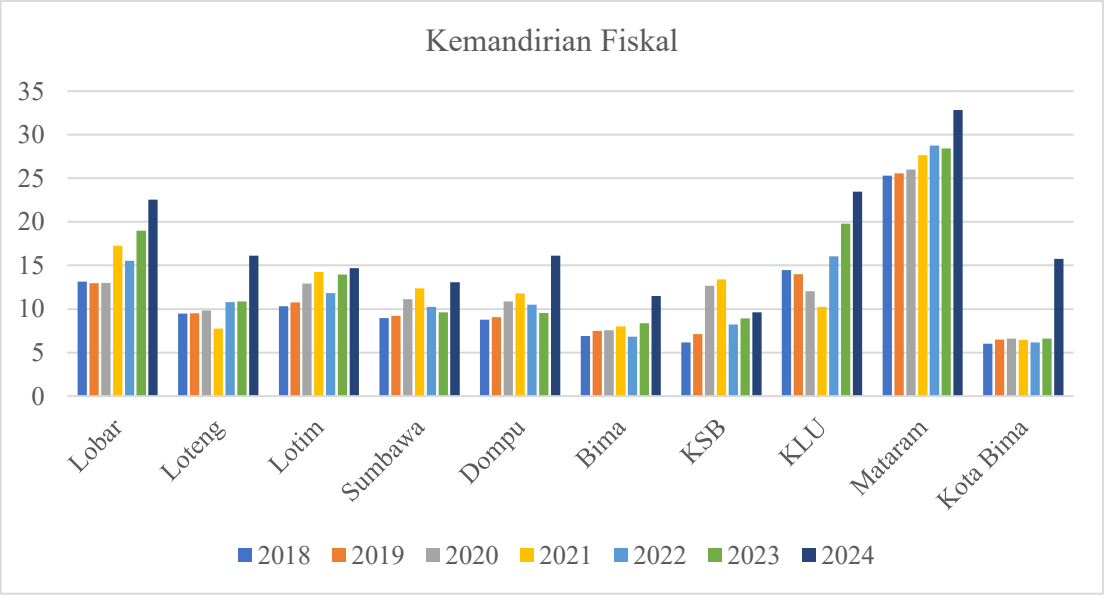
Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

mendelegasikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah sebagai agen yang harus bertanggung jawab mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel (Jensen & Meckling, 1976). Potensi konflik kepentingan antara principal dan agen dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang kuat, seperti pemisahan fungsi manajemen dan pengendalian keputusan serta peran aktif lembaga pengawas (Fama & Jensen, 1983), yang dalam konteks sektor publik diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif sebagai alat ukur kinerja finansial sekaligus instrumen transparansi dan akuntabilitas publik (Armono, Wicaksono & Fitriani, 2024).

Studi empiris menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di berbagai provinsi Indonesia (Juwita & Hasbi, 2025). Penelitian Mubarok, Nasution, Kusuma & Pangestu. (2022) di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Verawaty, Jaya, Puspanita & Nurhidayah., (2020) di kabupaten/kota Sumatera Selatan menemukan PAD berpengaruh positif signifikan sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Juwita & Hasbi (2025) di Provinsi Sumatera Utara menemukan PAD berpengaruh positif signifikan sementara belanja modal dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Studi Prastiwi & Aji (2020) di Provinsi Jawa Tengah menemukan ketiga variabel berpengaruh positif signifikan dengan koefisien determinasi 76,5%. Penelitian Yunita & Rasmini (2020) di Provinsi Bali menemukan partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih mengalami kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang tidak merata serta perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat (Hendri 2020). Kesenjangan tersebut tidak terlepas dari perbedaan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum merata, yang dalam penelitian oleh Sadaruddin, Manan, & Sriningsih., (2024) dianalisis menggunakan beberapa indikator rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di NTB memiliki tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah, yaitu rata-rata di bawah 20%, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hanya beberapa daerah seperti Kota Mataram yang memiliki tingkat kemandirian yang relatif lebih baik, yakni mencapai 42,26%. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah, khususnya dari sisi efisiensi, masih belum optimal karena sebagian besar daerah memiliki tingkat efisiensi yang rendah, yang tercermin dari besarnya pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan daerah (Sadaruddin, Manan & Sriningsih., 2024). Di sisi lain, kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sangat bervariasi, dimana sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat (Desdiani, Sabrina, Husna & Budiman., 2022).

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap keuangan pemerintah daerah di Provinsi NTB, dimana pendapatan daerah menurun karena aktivitas ekonomi terhenti sementara kebutuhan belanja untuk kesehatan dan bantuan sosial meningkat (Anas, 2021). Krisis kesehatan ini menguji kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang tidak terduga, dimana pemerintah daerah menghadapi tantangan yang lebih berat karena transfer antar pemerintah dikurangi sementara ruang untuk memobilisasi pembiayaan alternatif sangat terbatas (Desdiani, Sabrina, Husna & Budiman., 2022). Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran, yang berdampak pada tertundanya berbagai program pembangunan dan mengancam keberlanjutan kinerja keuangan daerah (Putri, Gamayuni & Dharma., 2023).



Gambar 1. Tingkat Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Prov NTB Periode 2018-2024

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Sumber: DJPK Kemenkeu (2018,2024) – data diolah

Dalam konteks pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satu indikator yang umum digunakan adalah rasio kemandirian fiskal. Rasio ini dihitung dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi rasio ini berarti daerah semakin mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat (Hariani & Febriyastuti, 2020). Data kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2018–2024 menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam rasio kemandirian fiskal, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan (Prastiwi & Aji, 2020).

Data kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi NTB selama periode 2018–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang dinamis dengan capaian yang bervariasi antarwilayah. Pada awal periode tahun 2018, sebagian besar daerah berada pada level yang cukup rendah, seperti Lombok Barat sebesar 13,13%, Lombok Timur 10,30%, Dompu 8,78%, dan KSB sebesar 6,16%. Memasuki tahun 2024, mayoritas wilayah mencatatkan peningkatan yang signifikan, dimana Lombok Barat tumbuh menjadi 22,56%, Dompu melonjak ke angka 16,11%, dan Kabupaten Lombok Utara melesat hingga 23,45%. Kota Mataram secara konsisten mendominasi sebagai daerah dengan nilai tertinggi yang terus meningkat dari 25,30% pada tahun 2018 hingga mencapai puncaknya sebesar 32,85% pada tahun 2024, sementara Kota Bima juga menunjukkan lonjakan drastis menjadi 15,76% di akhir periode (DJPK, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, yang mengindikasikan ketergantungan fiskal yang signifikan terhadap dana transfer pemerintah pusat sehingga berdampak pada lemahnya kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan (Setiawan, Rachma, Wulandari & Agustin., 2026). Periode 2018-2024 merupakan periode yang sangat menarik untuk diteliti karena mencakup kondisi normal sebelum pandemi, masa pandemi COVID-19, dan periode pemulihan ekonomi. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, penelitian yang mengkaji ketiga variabel ini secara lengkap dalam periode terbaru masih sangat terbatas, dimana penelitian Syahrul Huda (2015) hanya fokus pada pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal periode 2010-2014.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam beberapa dimensi. Dari sisi substansi, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji secara komprehensif pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi NTB menggunakan data panel periode 2018–2024, yang mencakup tiga fase kondisi fiskal berbeda yaitu pra-pandemi, pandemi COVID-19, dan pemulihan ekonomi, sehingga menghasilkan bukti empiris yang lebih representatif dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji kondisi normal. Dari sisi metodologis, penggunaan Fixed Effect Model yang telah melalui serangkaian uji spesifikasi secara ketat menghasilkan estimasi yang lebih akurat dalam menangkap heterogenitas antar kabupaten/kota di Provinsi NTB. Dari sisi pengembangan literatur, penelitian ini memperkaya kajian desentralisasi fiskal di kawasan Indonesia Timur yang selama ini masih sangat terbatas, khususnya untuk Provinsi NTB yang memiliki karakteristik fiskal unik berupa tingkat kemandirian yang rendah dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi PAD dan mereformasi pola ketergantungan fiskal guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui rasio kemandirian fiskal di seluruh kabupaten/kota Provinsi NTB periode 2018–2024. PAD dipilih karena optimalisasi PAD merupakan upaya utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah (Zakaria & Syahputra, 2022). Dana Perimbangan dimasukkan untuk melihat sejauh mana ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan daerah, mengingat secara empiris Dana Perimbangan terbukti berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah (Ardiansyah, 2023). Belanja Modal dipilih karena secara empiris telah diuji keterkaitannya dengan tingkat kemandirian keuangan daerah (Abdulfatah & Mulyani, 2024). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan transfer dana yang lebih efektif untuk daerah dengan karakteristik khusus seperti Provinsi NTB.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori *fiscal federalism* pertama kali dikembangkan oleh Oates (1972) yang menekankan pada pembagian tanggung jawab fiskal dan efisiensi alokasi sumber daya antar tingkat pemerintahan dalam sistem desentralisasi (Oates, 2005). Teori ini berargumen bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat (Oates, 2005). Dalam konteks desentralisasi fiskal, teori ini menyatakan bahwa transfer kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyediaan

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

barang dan jasa publik (Bojanic, 2018). Dalam konteks penelitian ini, teori *fiscal federalism* relevan untuk menjelaskan bagaimana PAD, dana perimbangan, dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi NTB (Oates, 2005). PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara mandiri, sementara dana perimbangan merupakan mekanisme transfer fiskal untuk mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah (Lewis, 2023). Belanja modal sebagai instrumen investasi publik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Badrudin & Siregar, 2019).

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan *(agency theory)* yang dikembangkan oleh *Jensen & Meckling* (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam konteks pemisahan kepemilikan dan control. Dalam konteks keuangan publik, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan publik kepada pemerintah daerah sebagai agen (*Jensen & Meckling*, 1976). Teori ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat) dalam mengelola sumber daya publik (Bojanic, 2018). Dalam konteks pemerintah daerah, *agency cost* dapat berupa inefisiensi pengelolaan keuangan, korupsi, atau alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas publik (Alfada, 2019). Untuk meminimalkan *agency cost*, diperlukan mekanisme monitoring dan insentif yang tepat untuk memastikan pemerintah daerah mengelola keuangan publik secara efisien dan akuntabel (*Jensen & Meckling*, 1976). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipandang sebagai indikator sejauh mana pemerintah daerah sebagai agen berhasil mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat sebagai prinsipal (Hummel & Kusumasari, 2025).

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi keuangan daerah, mengelola keuangan secara efisien dan efektif, serta mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Badrudin & Siregar, 2019). Pengukuran kinerja keuangan penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik dalam konteks desentralisasi fiskal (Bojanic, 2018). Salah satu indikator yang sering digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah (*independence ratio*), yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai aktivitasnya tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Zein, Muhtarom, Mulyadi & Septian., 2024). Secara struktural, total pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH); serta lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah dan dana darurat (Republik Indonesia, 2004). Rasio Kemandirian Fiskal (Y) dalam penelitian ini dioperasionalisasikan dengan formula:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \text{ x } 100\ \% \quad (1)$$

Rasio ini menjadi cerminan keberhasilan desentralisasi fiskal dan mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan mandat fiskal secara maksimal serta mengurangi risiko biaya keagenan (Wiryawan, 2022). Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokalnya dalam mendukung pelaksanaan otonomi fiskal (Mahmudi, 2019). PAD, dana perimbangan, dan belanja modal berperan sebagai faktor utama yang saling memengaruhi dalam menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yang pada akhirnya mencerminkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai tambahan terhadap kekayaan bersih daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan sah lainnya. PAD mencerminkan tingkat otonomi dan kemandirian fiskal suatu daerah, karena semakin besar peran PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut (UU No. 1 Tahun 2022). PAD merupakan cerminan kemampuan fiskal daerah dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Remanta & Ramadhan, 2024). Optimalisasi PAD menjadi prioritas penting dalam desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat (Azhar, 2021).

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa (UU No. 1 Tahun 2022). Namun, dalam penelitian ini dana perimbangan yang digunakan hanya terbatas pada tiga komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sejalan dengan penelitian Ardiansyah (2023) yang mendefinisikan dana perimbangan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

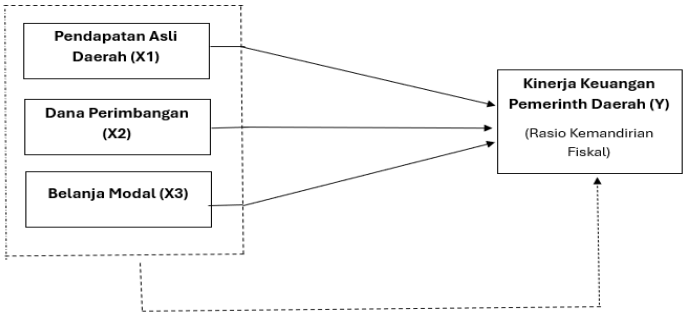
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan instrumen penting dalam sistem desentralisasi fiskal untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) dan ketimpangan fiskal horizontal (antar pemerintah daerah) (Oates, 2005). Tujuan dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik (Defitri, Fetrisia & Maison., 2021).

2.1.6 Belanja Modal

Belanja modal dalam penelitian ini merujuk pada belanja modal yang tercatat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan konsep dalam akuntansi nasional. Belanja modal APBD adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya (PP No. 71 Tahun 2010). Sebagai salah satu komponen pengeluaran dalam APBD, belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam berinvestasi pada infrastruktur dan sarana pelayanan publik yang secara langsung dapat meningkatkan kapasitas produktif daerah (Febrianty & Putra, 2023). Alokasi belanja modal yang optimal dalam APBD menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiryawan, 2022).

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti serta didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengintegrasikan teori desentralisasi fiskal (Oates, 2005) dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976).



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada Gambar 2 menjelaskan bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal (X3) sebagai indikator variabel independen terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019-2024, baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial, setiap variabel independen diuji pengaruhnya secara sendiri-sendiri terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) menggunakan Uji t, sedangkan secara simultan ketiga variabel tersebut diuji pengaruhnya secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) menggunakan Uji F. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing maupun keseluruhan variabel independen dalam menentukan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tersebut.

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2018 – 2024. Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, NTB merupakan provinsi dengan tingkat kesenjangan fiskal antar kabupaten/kota yang masih tinggi, yang terlihat dari variasi rasio kemandirian fiskal antara daerah dengan PAD kuat seperti Kota Mataram dan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari lembaga resmi pemerintah dan publikasi terbuka. Data meliputi realisasi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, serta Kinerja Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018–2024.

2.5 Teknik Analisis dan Pengujian

2.5.1 Teknik Analisis

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software EViews 12. Analisis regresi data panel dipilih karena menggabungkan data cross-section (10 kabupaten/kota di Provinsi NTB) dengan data time series (periode 2018-2024). Menurut (Basuki, 2021) data panel yang juga dikenal sebagai data longitudinal merupakan kombinasi antara data silang (*cross section*) dan data deret waktu (*time series*). Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$Yit = \beta0 + \beta1X1it + \beta2X2it + \beta3X4it + \varepsilon it \quad (2)$$

Untuk menyamakan satuan dari variabel-variabel terkait maka model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dapat ditulis sebagi berikut :

$$LogYit = \beta0 + Log\beta1X1it + Log\beta2X2it + Log\beta3X4it + \varepsilon it$$

Dimana Y merupakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dalam persentase, X1 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur dalam miliar rupiah, X2 adalah Dana Perimbangan yang diukur dalam miliar rupiah, dan X3 adalah Belanja Modal yang diukur dalam miliar rupiah. Selanjutnya, β0 merupakan konstanta (intercept), sedangkan β1 sampai β3 merupakan parameter yang diduga dari variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Simbol i menunjukkan individu atau Kabupaten/Kota, t menunjukkan periode waktu penelitian dari tahun 2018–2024, dan ε merupakan error term atau tingkat kesalahan dalam model penelitian.

Menurut (Widarjono, 2009) pada analisis regresi data panel, terdapat beberapa Langkah yang harus ditempuh dengan memilih pendekatan yang tepat yaitu:

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Common Effect Model*), Common Effect Model merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel yang menggabungkan data deret waktu dan silang tanpa mempertimbangkan perbedaan antar individu atau waktu, serta menggunakan estimasi kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*).
b. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*), Fixed Effect Model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat ditangkap melalui perbedaan intersep, dimana setiap individu memiliki parameter intersep yang berbeda meskipun koefisien slope tetap sama. Estimasi model ini menggunakan teknik Least Square Dummy Variable (LSDV) dengan menambahkan variabel dummy antar kabupaten/kota dan dapat mengakomodasi efek waktu sistemik melalui penambahan variabel dummy waktu.
c. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*), Random Effect Model mengestimasi data panel dengan mempertimbangkan korelasi antar waktu dan individu pada variabel gangguan, dimana efek spesifik individu dianggap sebagai komponen error acak yang tidak berkorelasi dengan variabel penjelas. Model ini disebut juga Error Component Model (ECM) yang menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) dengan asumsi komponen error bersifat homoskedastik dan tidak ada korelasi antar seksi silang, serta memiliki keunggulan dalam mengatasi heteroskedastisitas.

Untuk menentukan pendekatan model terbaik dalam regresi data panel, dilakukan uji spesifikasi model terhadap tiga bentuk model estimasi, yaitu :

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model *common effect* atau *fixed effect* lebih tepat dalam analisis data panel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kedua model melalui uji *redundant fixed effect likelihood ratio*. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka model *fixed effect* dipilih dan dilanjutkan dengan uji Hausman (Hutagalung & Darnius Prasanti, 2022). Uji Hausman bertujuan memilih model *fixed effect* atau *random effect* yang paling sesuai. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas chi-square, di mana jika > 0,05 maka *random effect* diterima, dan jika < 0,05 maka *fixed effect* dipilih (Hutagalung & Darnius Prasanti, 2022). Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah model *random effect* lebih tepat dibandingkan *common effect*. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai statistik LM dengan chi-square; jika LM < chi-square maka *random effect* dipilih, sedangkan jika LM > chi-square maka *common effect* diterima (Hutagalung & Darnius Prasanti, 2022).

2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, sementara uji autokorelasi tidak dilakukan karena uji Durbin-Watson lebih dirancang untuk data time series murni dan kurang tepat diterapkan pada data panel (Gujarati, 2003). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal dengan menggunakan metode Jarque-Bera, dimana residual dianggap normal apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (Widarjono, 2009). Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, dimana model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 (Ghozali, 2021). Sementara itu, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual antar observasi bersifat konstan, yang dapat dilakukan melalui metode Glejser, White test, atau grafik scatterplot, dan model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021).

2.5.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini mencakup tiga pengujian, yaitu Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial, dimana jika p-value < 0,05 maka variabel

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen sekaligus menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan, dimana jika p-value < 0,05 maka model regresi dinyatakan signifikan secara simultan (Ghozali, 2021). Sementara itu, Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan nilai yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan yang tinggi dan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang sangat terbatas (Ghozali, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pemilihan Model

3.1.1 Hasil Uji Spesifikasi Model

Tabel 1. Hasil Uji Spesifikasi Model

Uji	Statistik	Nilai Probabilitas	Keputusan	Model Terpilih
Uji Chow	Cross-section Chi-square	0.0000	< 0.05	FEM
Uji Hausman	Cross-section Chi-square	0.0000	0.05	FEM

Berdasarkan Uji Chow, nilai *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga model Common Effect ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan. Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai 0,0000 < 0,05, yang berarti Random Effect Model ditolak karena terdapat korelasi antara efek individu dan variabel independen. Dengan demikian, berdasarkan kedua uji tersebut, model yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model terbaik dan paling tepat digunakan dalam penelitian ini, serta telah memenuhi prosedur pemilihan model data panel secara metodologis tanpa perlu dilakukan Uji Lagrange Multiplier (LM).

3.1.2 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Terpilih Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	1.297034	0.408434	3.175627	0.0024
LOG(X1)	0.703146	0.029656	23.70996	0.0000
LOG(X2)	-0.246675	0.070099	-3.518951	0.0009
LOG(X3)	-0.135521	0.025522	-5.309914	0.0000

Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai konstanta (C) adalah 1,297034. Adapun koefisien untuk setiap variabel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar 0,703146, variabel Dana Perimbangan menunjukkan koefisien –0,246675, sedangkan variabel Belanja Modal memperlihatkan koefisien –0,135521. Berdasarkan koefisien yang diperoleh, maka dapat disusun formulasi persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$LOG(Yit) = 1{,}297034 + 0{,}703146X1it - 0{,}246675X2it - 0{,}135521X3it + \varepsilon it$$

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2021). Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), dimana jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2021).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.166818	3176.716	NA
LOG(X1)	0.000879	448.3896	1.289347
LOG(X2)	0.004914	4542.803	1.438574
LOG(X3)	0.000651	375.2310	1.268339

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Gambar 3, nilai Centered VIF untuk semua variabel independen menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari 10. Variabel LOG(X1) atau Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Centered VIF sebesar 1,289347, variabel LOG(X2) atau Dana Perimbangan memiliki nilai Centered VIF sebesar 1,438574, dan variabel LOG(X3) atau Belanja Modal memiliki nilai Centered VIF sebesar 1,268339. Dengan demikian, dapat

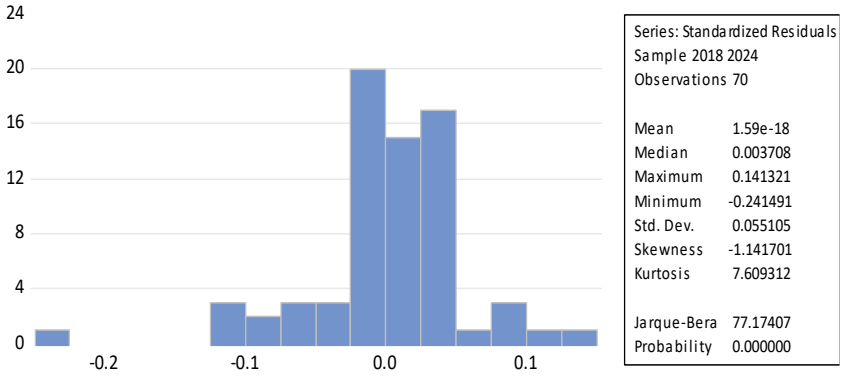
© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model penelitian ini, yang berarti tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

3.2.2 UjiNormalitas

Uji normalitas dilihat dari nilai p-Value Jarque-Bera atau nilai Probabilitas dimana pada penelitian ini yaitu sebesar 0,000000 < 0,05 yang menyatakan data tidak terdistribusi normal. Dalam regresi panel, asumsi normalitas residual tidak mutlak harus dipenuhi untuk mendapatkan estimator yang konsisten, karena teori *asymptotic* menjamin distribusi sampling yang mendekati normal pada ukuran sampel yang cukup besar. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap normalitas residual tidak selalu mengharuskan transformasi, terutama jika model telah memperhatikan masalah heteroskedastisitas (Wooldridge, 2010).



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual (ABS_RESID) terhadap variabel independen (Ghozali, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-0.442034	0.224926	-1.965238	0.0543
LOG(X1)	0.031607	0.016332	1.935305	0.0579
LOG(X2)	0.046437	0.038604	1.202913	0.2340
LOG(X3)	-0.001470	0.014055	-0.104581	0.9171

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal, memiliki nilai probabilitas (p value) lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, sehingga varians residual bersifat konstan atau homoskedastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik dan hasil estimasi koefisien dapat dipercaya untuk analisis dan penarikan kesimpulan penelitian. Hasil ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan dapat dianggap layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut (Malida & Sumanto, 2024).

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021).

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	1.297034	0.408434	3.175627	0.0024
LOG(X1)	0.703146	0.029656	23.70996	0.0000
LOG(X2)	-0.246675	0.070099	-3.518951	0.0009
LOG(X3)	-0.135521	0.025522	-5.309914	0.0000

Hasil pengujian statistik t pada penelitian ini disajikan pada hasil regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Pada tabel tersebut menampilkan nilai t-hitung beserta nilai probabilitas (p-value) untuk setiap variabel independen. Dalam penelitian ini, digunakan tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis dapat diuji dan dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut. Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

koefisien regresi sebesar 0,703146 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar -0,246675 dengan nilai probabilitas 0,0009 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sementara itu, variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar -0,135521 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur menggunakan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah.

3.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan berdasarkan nilai F-statistic yang diperoleh dari hasil regresi menggunakan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	Prob (F-statistic)	Keterangan
281.5967	0.000000	Signifikan

Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan tabel di atas nilai probabilitas (F-statistic) yaitu 0.000000 < 0.05 maka secara simultan semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dengan variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Dearah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal (X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.983412	Mean dependent var	2.467475
Adjusted R-squared	0.979919	S.D. dependent var	0.427852
S.E. of regression	0.060629	Akaike info criterion	-2.602095
Sum squared resid	0.209526	Schwarz criterion	-2.184518
Log likelihood	104.0733	Hannan-Quinn criter.	-2.436228
F-statistic	281.5967	Durbin-Watson stat	2.418729
Prob (F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan Tabel 7, nilai koefisien determinasi atau R2 didasarkan dari hasil regresi dengan fixed Efeect Model, yaitu nilai Adjusted R-squared (jika menggunakan > 1 variabl bebas, dimana pada penelitian menggunakan 3 variabel bebas) yaitu sebesar 0.979919 maka variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal ((X3) dapat memberikan pengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y) sebesar 0.979919 atau 97,99%. Sehingga terdapat 2,01% dipengaruhi oleh varibel lain yang tidak dijelaskan didalam model regresi yang mempengaruhi kinerja keuangan. Adapun sisanya sebesar 2,01% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel lain tersebut diduga turut mempengaruhi Kinerja Keuangan, namun tidak menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan konsep dalam Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 2005) ang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan dan belanja yang telah diteliti, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kemandirian fiskal, kualitas tata kelola, maupun kapasitas kelembagaan daerah. elain itu, dalam perspektif Teori Keagenan (*Jensen & Meckling*, 1976), terdapat faktor-faktor lain yang potensial mempengaruhi kinerja keuangan seperti transparansi pengelolaan keuangan, kualitas pengawasan internal, serta kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,703146 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur melalui Rasio Kemandirian Fiskal. Nilai koefisien positif sebesar 0,703146 menunjukkan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar 0,70%, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini relevan dengan kondisi empiris kabupaten/kota di Provinsi NTB yang selama periode 2018–2024 masih mencatatkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah, dimana sebagian besar daerah berada di bawah rata-rata 20%, kecuali Kota Mataram yang secara konsisten memiliki proporsi PAD tertinggi dan sekaligus mencatatkan rasio kemandirian fiskal terbaik yang terus meningkat dari 25,30% pada tahun 2018 hingga 32,85% pada tahun 2024 mengonfirmasi bahwa daerah dengan kemampuan menggali PAD yang lebih tinggi akan memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik pula. Hal ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 2005) yang menegaskan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal, sekaligus

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

bukti nyata bahwa pemerintah daerah telah mampu menjalankan peran sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik secara mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Teori Keagenan (*Jensen & Meckling*, 1976). Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahman & Altin (2023) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan kemandirian fiskal daerah, dan memperkuat urgensi bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB untuk terus mengintensifkan upaya optimalisasi PAD guna mengurangi ketergantungan struktural terhadap dana transfer pemerintah pusat yang selama ini masih mendominasi struktur pendapatan daerah.

3.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar -0,246675 dengan nilai probabilitas 0,0009 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur melalui Rasio Kemandirian Fiskal. Nilai koefisien negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Dana Perimbangan sebesar 1% akan menurunkan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar 0,24%, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini sesuai dengan kondisi struktural kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode 2018–2024, dimana sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dengan rata-rata rasio kemandirian fiskal di bawah 20%, mencerminkan bahwa Dana Perimbangan yang besar justru tidak mendorong kemandirian daerah, melainkan menciptakan ketergantungan fiskal yang persisten terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini semakin diperparah pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, dimana transfer antar pemerintah dikurangi secara signifikan sementara ruang mobilisasi pembiayaan alternatif sangat terbatas, sehingga daerah-daerah yang selama ini mengandalkan Dana Perimbangan sebagai sumber pendapatan utama menghadapi tekanan fiskal yang jauh lebih berat. Dari perspektif Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 2005), dominasi Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan daerah mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal di Provinsi NTB belum berjalan optimal, karena pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada transfer pusat cenderung kehilangan insentif untuk mengoptimalkan potensi PAD lokal sebagai sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan. Sementara dari perspektif Teori Keagenan (*Jensen & Meckling*, 1976), ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan mengindikasikan lemahnya kapasitas agen—dalam hal ini pemerintah daerah—dalam memenuhi tanggung jawab fiskalnya secara mandiri kepada prinsipal, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efisien karena dana transfer umumnya dialokasikan untuk belanja rutin yang kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian fiskal bersifat terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wasil (2020) yang secara konsisten menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan kemandirian fiskal daerah.

3.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar -0,135521 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal Daerah. Nilai koefisien negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Belanja Modal sebesar 1% akan menurunkan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0,13%, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Meskipun secara teoritis Belanja Modal seharusnya berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal, hasil ini dapat dijelaskan melalui argumentasi bahwa manfaat ekonomi dari Belanja Modal khususnya dalam memperluas basis pajak dan retribusi daerah yang bermuara pada peningkatan PAD membutuhkan jangka waktu yang jauh lebih panjang dari rentang periode penelitian 2018–2024 untuk dapat terwujud secara terukur. Dari perspektif Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 2005), sebagian besar Belanja Modal pemerintah daerah di Indonesia masih diarahkan pada infrastruktur sosial yang bersifat non-komersial sehingga tidak langsung menciptakan sumber penerimaan baru bagi daerah, sementara dari perspektif Teori Keagenan (*Jensen & Meckling*, 1976), potensi inefisiensi alokasi akibat asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal turut menyebabkan Belanja Modal gagal mendorong peningkatan kapasitas fiskal mandiri. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya realokasi anggaran besar-besaran pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021 yang mendistorsi pola normal hubungan antara Belanja Modal dan kemandirian fiskal daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hutauruk (2024) yang menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* terhadap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018–2024, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang diukur melalui Rasio Kemandirian Fiskal dengan daya penjelas sebesar 97,99%, sedangkan sisanya sebesar 2,01% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan, mengonfirmasi bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah merupakan faktor penentu utama kemandirian fiskal, sebagaimana tercermin dari dominasi Kota Mataram yang secara konsisten mencatatkan rasio kemandirian tertinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi NTB selama periode penelitian. Sebaliknya, Dana Perimbangan dan Belanja Modal masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Kemandirian Fiskal. Pengaruh negatif Dana Perimbangan mengindikasikan bahwa ketergantungan struktural terhadap transfer pemerintah pusat yang masih mendominasi struktur

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

pendapatan sebagian besar kabupaten/kota di NTB justru melemahkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi insentif untuk mengoptimalkan potensi PAD lokal. Sementara itu, pengaruh negatif Belanja Modal mencerminkan bahwa alokasi belanja infrastruktur yang belum sepenuhnya berorientasi pada aset produktif penghasil PAD, ditambah distorsi akibat *refocusing* anggaran besar-besaran pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, menyebabkan manfaat fiskal jangka panjang dari Belanja Modal belum dapat terwujud secara optimal dalam rentang periode penelitian ini. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi catatan dalam menginterpretasikan temuan. Dari sisi cakupan variabel, model yang digunakan hanya mengakomodasi tiga faktor fiskal sehingga belum mampu menangkap pengaruh faktor-faktor struktural lain seperti kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah, transparansi pengelolaan keuangan, serta tingkat investasi swasta yang dalam perspektif Teori Keagenan berpotensi signifikan memengaruhi kemandirian fiskal daerah. Dari sisi pengukuran, penggunaan Rasio Kemandirian Fiskal sebagai satu-satunya proksi kinerja keuangan belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh dimensi kinerja fiskal daerah, mengingat rasio efektivitas, efisiensi, dan derajat desentralisasi fiskal turut memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dari sisi temporal, periode penelitian yang mencakup masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan bias struktural dalam estimasi karena kondisi krisis tersebut merupakan anomali yang mendistorsi pola fiskal normal sehingga perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB untuk mengintensifkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, serta pengembangan infrastruktur pariwisata dan kawasan ekonomi produktif yang secara langsung memperluas basis pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mereorientasi alokasi Belanja Modal ke arah investasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penciptaan sumber PAD baru, sementara pemerintah pusat perlu mendesain skema Dana Perimbangan berbasis insentif kinerja PAD yang mendorong daerah untuk secara progresif mengurangi ketergantungan terhadap transfer fiskal pusat. Secara akademik, penelitian ini memperkuat relevansi Teori Desentralisasi Fiskal dan Teori Keagenan dalam menjelaskan dinamika pengelolaan keuangan daerah berkapasitas fiskal rendah di kawasan Indonesia Timur, sekaligus membuka agenda penelitian lanjutan untuk mengkaji variabel moderasi seperti kualitas pengawasan internal dan partisipasi masyarakat, menggunakan pendekatan dinamis seperti panel VAR atau error correction model, serta memperluas cakupan wilayah ke provinsi-provinsi lain di kawasan timur Indonesia guna menghasilkan generalisasi empiris yang lebih luas.

REFERENCES

Abdulfatah, T., & Mulyani, S. (2024). Pengaruh PDRB Per Kapita , Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JAKBS)*, *02*(02), 694–701. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/inde

Alfada, A. (2019). Does Fiscal Decentralization Encourage Corruption in Local Governments ? Evidence from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, *12*(3), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm12030118

Alonso, J. M., & Andrews, R. (2019). Fiscal decentralization and local government efficiency: does relative deprivation matter? *Environment and Planning C: Politics and Space*, *37*(2), 360–381. https://doi.org/10.1177/2399654418784947

Anas, M. (2021). Impact Of Pandemic Covid-19 On L Ocal G Overnments Financial Performance In Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, *56*(3), 197–205. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.3.16

Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Profesional (JPRO)*, *4*(1), 92–106. https://doi.org/10.32815/jpro.v4i1.1707

Armono, D., Wicaksono, N. I., & Fitriani, A. (2024). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Aplikasi Bisnis (JABIS)*, *21*(2), 617–627. https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss2.art4

Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *11*(02), 164–174. https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190

Badrudin, R., & Siregar, B. (2019). The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy. *Journal of Reviews on Global Economics*, *8*, 611–624. https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.53

Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan EViews)*. Katalog dalam Terbitan (KDT).

Bojanic, A. N. (2018). The Impact of Fiscal Decentralization on Accountability , Economic Freedom , and Political and Civil Liberties in the Americas. *Economies*, *6*(1), 1–20. https://doi.org/10.3390/economies6010008

Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Ekonomia*, *11*(1), 10–19. https://doi.org/https://ejournal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/8229

Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., & Budiman, A. C. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, *15*(5), 108. https://www.mdpi.com/1911-8074/15/5/108

DJPK. (2024). *Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat*.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems And Residual Claims. *Journal of Law and Economics*, *26*(2), 327–349. https://doi.org/10.1086/467038

Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah , Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi (JKA)*, *1*(2), 30–46. https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics, 4th Edition.*

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The Effect of Fiscal Stress, Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 304-315
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9470
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Efficiency Ratio of Government Independence Performance. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *12*(1), 18–25. https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p018

Hendri. (2020). Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *4*(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v4i2.1092

Huda, A. S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Nusa Tenggara Barat. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(2), 151–166. https://doi.org/10.24252/.v5i2.1194

Hummel, D., & Kusumasari, B. (2025). Local Government Financial Performance and Decentralization in Indonesia. *State and Local Government Review*, *58*(2), 206–227. https://doi.org/10.1177/0160323X251364379

Hutagalung, I., & DarniusPrasanti, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, *5*(c), 217–226. https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422

Hutauruk, M. F. M. (2024). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), 42932–42939. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i3.20606

Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. *3*, 305–360.

Juwita, A., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh Belanja Modal Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022. *Urnal EMT KITA*, *9*(1), 78–86. https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3315

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn, 2019.

Mubarok, M. H., Nasution, A. A., & Kesuma, S. A. (2022). Local government financial performance : the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province , Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *9*(6), 503–512. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364

Oates, W. E. (2005). Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. *International Tax and Public Finance*, *12*, 349–373.

PP No. 71 Tahun. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, *28*(1), 89–105. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45

Putri, H. A., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2023). Financial Performance of Local Governments Before and After Refocusing and Budget Reallocation Policy for Handling Covid-19 In Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *21*(1), 37–47. https://doi.org/10.24167/jab.v21i1.10020

Rahman, A., & Altin, D. (2023). Literatur Review: Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, *25*(1), 104–116. https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.655

Remanta, O., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, *05*(04), 457–465. https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1193

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (pp. 1–3). Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004

Sadaruddin, S., Manan, A., & Sriningsih, S. (2024). An Analysis of Financial Performance and Regional Capability Mapping in Regencies and Cities of Nusa Tenggara Barat Province (2018-2022). *Economy and Finance Enthusiastic*, *2*(2), 83–98. https://doi.org/10.59535/efe.v2i2.256

Setiawan, A. B., Rachma, S., Wulandari, H. B., & Agustin, P. D. (2026). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2022. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, *6*(1), 01–14. https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i1.8115

UU No. 1 Tahun. (2022). *UU No. 1 Tahun 2022*. *104172*.

Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, *19*(1), 21–37. https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560

Wasil, M. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesi*, *1*(2), 99–109. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Edisi Keti). Ekonisia — Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII).

Wiryawan, B. A. (2022). The Legacy of the Reformasi: The Role of Local Government Spending on Industrial Development in a Decentralized Indonesia. *Journal of Economic Structures*, *11*(3), 1–12. https://doi.org/10.1186/s40008-022-00262-y

Wooldridge, J. M. (2010). Economic Analysis Of Cross Section and Panel Data. *Humor*, *16*(4), 369–412. https://doi.org/10.1515/humr.2003.021

Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(4), 1049–1065. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i04.p20

Zakaria, R., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia*, *6*(1), 47–59. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545

Zein, M. H. M., Muhtarom, M., Mulyadi, M., & Septiani, S. (2024). Examining the Role of Local Government's Financial Performance and Capital Expenditure in Increasing Economic Growth in Banten Province, Indonesia (2018–2022). *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(10). https://doi.org/10.3390/jrfm17100456

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.